Pengawasan Tertib Lalulintas Dalam Menanggulangi Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungpinang

Eva Lumbanbatu[1], Adji Suradji Muhammad[2], Ramadhani Setiawan[3]

evamarbun97@gmail.com

[1,2,3] Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Peraturan tertib lalulintas bertujuan untuk mengatur ketertiban untuk mengatur ketertiban umum maupun terselenggaranya tertib lalulintas yang aman, nyaman, tertib dan teratur dalam penggerakan lalulintas kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini dapat kita temukan di daerah perkotaan dan kususnya dalam penelitian ini berlangsung di kota Tanjungpinang. Kegiatan peraturan pengendalian lalulintas yang dilakukan oleh Satlantas dan Dishub kota Tanjungpinang tidak berjalan secara optimal karena masih banyak terjadi kasus pelanggaran dan kecelakaan lalulintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian lalulintas yang dilakukan oleh pihak Satlantas dan Dishub Kota Tanjungpinang dalam menanggulangi kecelakaan kendaraan bermotor dan mengetahui faktor yang menjadi penghambat peraturan pengendalian lalulintas yang dilakukan oleh Satlantas dan Dishub Kota Tanjungpinang.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneiliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Dengan menggunakan informan kunci sebagai sumber informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan tertib lalulintas dalam menanggulangi kecelakaan kendaraan bermotor di kota Tanjungpinang belum maksimal, karena walaupun menurun tetapi masih cukup banyak masyarakat yang belum sadar akan penting keselamatan lalulintas. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan oleh petugas tertib lalulintas masih kurangnya personel untuk melakukan pengawasan atau jumlah dengan apa yang diamati sehingga tugas kurang dilakukan dengan baik, kurang kesadaran masyarakat dalam tertib lalulintas.

Kata kunci: pengawasan, peraturan tertib lalulintas

ABSTRACT

Regulations on traffic order are aimed at regulating order to regulate public order and the implementation of safe, comfortable, orderly and orderly traffic order in the movement of motorized traffic on the highway. This can be found in urban areas and specifically in this study took place in the city of Tanjungpinang. Activities of traffic control regulations carried out by the Tanjungpinang city Satlantas and Dishub did not run optimally because there were still many cases of violations and traffic accidents. The purpose of this study is to find out how traffic control is carried out by the Tanjungpinang City Satlantas and Dishub in tackling motor vehicle accidents and knowing the factors that become obstacles to traffic control regulations carried out by the Tanjungpinang City Satlantas and Dishub. This study uses a qualitative method with a descriptive approach . In collecting data, researchers use interview, observation, documentation techniques. By using key informants as sources of information. The results showed that the traffic control in tackling motor vehicle accidents in the city of Tanjungpinang was not maximal, because even though it was declining, there were still enough people who were not aware of the importance of traffic safety. Factors that hinder supervision by traffic orderly officers are still lack of personnel to conduct supervision or the amount of what is observed so that the task is not carried out properly, lack of public awareness in traffic order.

Keywords: supervision, traffic order rules

PENDAHULUAN

Organisasi merupakan satu wadah tempat berkumpulnya satu orang atau lebih dalam mencapai satu tujuan tertentu. Dengan kata lain kemajuan organisasi harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai harapan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan peraturan pemerintah maka diperlukan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat. Tidak terlepas pula dengan aturan tertib lalulintas yang bertujuan untuk mengatur ketertiban umum maupun terselenggaranya tertib lalulintas yang aman, nyaman, tertib dan teratur dalam pergerakan lalulintas kendaraan bermotor di jalan raya.

Tercapainya keadaan tertib lalulintas berkendaraan bermotor perlu dilakukan pengawasan yang ketat sehingga dapat mengurangi kecelakaan. Pengawasan tersebut merupakan tanggung jawab pihak kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam pengamanan lalulintas yang dapat mengurangi kemacetan, memberikan pengarahan tertib lalulintas pada masyarakat selain itu dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas satlantas. Petugas satuan lalulintas (SATLANTAS) yang melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum dalam menangani permasalahan lalulintas tentunya harus bertanggung jawab penuh melakukan tertib lalulintas. Sejalan dengan aturan tertib lalulintas yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau masyarakat serta terjamin dari segi keselamatan.

Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan atau lingkungan." Sesuai dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dengan pasal 1 ayat 30 yaitu "Ketertiban lalulintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

Table.1
Data Kasus Kecelakaan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2018

No	Jenis Kasus kecelekaan	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Crime total	91 kasus	83 kasus
2.	Crime clerence	75 kasus	48 kasus
3.	Meninggal dunia	26 kasus	17 kasus
4.	Luka berat	7 kasus	4 kasus
5.	Luka ringan	114 kasus	132 kasus
Kerugian material		Rp. 135.900.000,-	Rp. 94.400.000,-

Sumber : POLRES Kota Tanjungpinang, 2019.

Dalam laporan keterangan pertanggung jawaban oleh petugas tertib lalulintas yang di rangkum oleh POLRES Tanjungpinang tercatat perbandingan tahun 2017 dengan 2018 crime total turun 8 kasus (8%) *crime clerence* turun 27 kasus (36 %) meninggal dunia turun 9 kasus (34%) luka berat turun 3 kasus (34 %) luka ringan naik 18 kasus (15%) kerugian material turun Rp. 38. 500.000,-. Berdasarkan data kejadian kecelakaan lalulintas tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian yang serius oleh semua pihak kususnya Satlantas dan Dishub kota Tanjungpinang dalam memberikan pengawasan tentang tertib lalulintas bagi pengendara bermotor dan lebih memberikan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang tatacara tertib lalulintas yang benar selama mengemudi kendaraan di jalan raya.

Sesuai dengan urian sebelumnya maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui tentang Pengawasan Tertib Lalulintas dalam Menanggulangi Kecelakaan Kendaraan Bermotor oleh Petugas tertib lalulintas di Kota Tanjungpinang. Dan Untuk mengetahui faktor hambatan yang dialami petugas dalam melaksanakan petugas dalam pengawasan tertib lalulintas berkendaraan bermotor di kota Tanjungpinang.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan yang di kemukakan Sugiyono dalam Paslong (2012:161) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Jadi penelitian bukan lah konsep yang dirancang bangun oleh penelitian secara sepihak di berlakukan pada diri *subject* informan disaat pengungkapan data dan informasi. Adapun lokasi penelitian adalah berlokasi di DISHUB kota Tanjungpinang Terminal Sungai Carang Komplekk Bintan Center Jalan D.I panjaitan KM. IX Kel. Air Raja kecamatan Tanjungpinang Timur.dan di POLRES kota Tanjungpinang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, km 5.

Teknik yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informasi menurut Sugiyono (2015:53) menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder:

1. Data primer merupakan, data yang diperoleh dalam penelitian, dengan cara wawancara dan pengamatan secara langsung.
2. Data Sekunder merupakan data yang didapat dengan cara mengumpulkan laporan-laporan antara lain melalui:
   a) Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
   b) Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, Menurut Deddy Muliyani (Sugiyono 2015:180) menyebutkan bahwa wawacara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan–pertanyaan berdasarkan tujuan dan bentuk."
2. Observasi yaitu: metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang akan di teliti.
3. Dokumentasi, Menurut Sogiyono (2006:422) menyebutkan bahwa; dokumentasi yaitu: dalam berbentuk tulisan seperti catatan harian, cerita biografi, peraturan perundang-undangan . dokumen yang berbentuk gambar, yaitu foto, sketsa dan lain-lain.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246-253) yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data diantaranya *data reduction* (reduksi data), *data display* dan *conclusion drawing/verifivication*.

HASIL PENELITIAN

1. Pengawasan Tertib Lalulintas Dalam Menanggulangi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kota Tanjungpinang.

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitiannya deskripstif yang sifatnya menggambarkan sesuai dengan situasi di lapangan. Terdapat dua jenis pengawasan yaitu bersifat mencegah (*preventivecontrol)* dan tindakan kontrol sesudah terjadi penyimpangan atau pelanggaran (*repressive control).* Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi dari pengawasan. Menurut Nawawi (2000:115), pengawasan atau *control* diartikan sebagai proses pengukur *(measurement)* dan menilai *(evaluation)* tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian (2003:115) ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pemimpin terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi lansung.
b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan tertulis dan lisan.

Menurut Bohari (2004:9) fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah

direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menghindari kesalah pahaman tentang istilah atau variabel yang dalam pengawasan penulis menggunakan jenis peneltian deskriptif yang sifatnya hanya menggambarkan suatu proses pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan pengamatan yang dilakukan secara berkala dan berhasil di gunakan oleh pemimpin unit atau organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja dilingkungan masing-masing yang ada di Dinas Perhubungan dan Polres kota Tanjungpinang agar terus-menerus maksimal dan melaksanakan yang terarah pada pencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Untuk mengetahui pengawasan tertib laulintas dikota tanjungpinang maka diperlukan pengawasan menurut Siagian (makmur 2011:193) sebagai berikut:

a. Analisa Pemantauan

Pemantauan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan yang baik kepada para petugas yang melaksanakan kegiatan dalam dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat secara langsung *(direct)* maupun di lakukan secara tidak langsung *(indirect).* Melalui laporan dari pimpinan untuk yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita telah di rencanakan dapat di implementasikan dengan baik.

Menurut analisis peneliti dilapangan adanya pemantaun langsung terhadap penertiban lalulintas di jalan raya. Disamping itu dapat pula memberikan keyakinan semua pihak atas hasil pengawasan yang dilakukan, itu menunjukan bahwa Dinas

Perhubungan dan pihak kepolisian mengerjakan tugas masing-masing memantau ketertiban lalulintas agar tidak terjadi pelanggaran dan tertib pada aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dari ketiga petugas Dishub dan satuan lalulintas bahwa pemantuan yang dilakukan oleh Dishub dan polres itu berbeda bahwasanya Dishub melakukan pemantuan tertib lalulintas dilapangan itu terbatas dari segi aturan tidak efektif karena wewenang Dishub Cuma masalah perparkiran dan penertiban, dan yang paling berwewenang dalam pemantauan langsung itu adalah pihak kepolisiaan, pihak kepolisian melakukan patroli secara rutin dan berkelanjutan dalam pemantauan tertib lalulintas terutama di titik-titk rawan kecelakaan. Dengan adanya petugas patroli pihak kepolisian dalam melakukan pemantauan secara langsung maka penertiban kendaraan di jalan raya sudah lumayan efektif.

b. Analisa Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan Karena dengan memulai pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang baik.

Menurut analisa peneliti adanya melakukan pemeriksaan kepada yang melakukan pelanggaran tentang tata tertib lalulintas itu ada peringatan kepada pelanggar oleh pihak Satlantas, peringatan tersebut berupa teguran atau diberi sanksi. Dengan adanya pemeriksaan terhadap pelanggaran tentang tata tertib lalulintas, maka pengguna jalan akan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Dari hasil wawancara

tersebut dapat dianalisa bahwasanya Dinas perhubungan dan Sautuan Lalulintas dalam penindakan pelanggaran tata tertib lalulintas dikatakan baik, karena Dinas Perhubungan dan Satuan Lalulintas menjalankan sesuai dengan penetapan yang ada dalam peraturan udang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

c. Analisa Penilaian

Penilaian adalah menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan apakah itu dilakukan kebenaran ataukah dilaksanakan suatu penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak SATLANTAS DISHUB dapat menganalisis bahwa dalam bentuk penilaian oleh Dinas Perhubungan dan Satuan lalulintas Kota Tanjungpinang dalam mensosialisasikan tentang peraturan tata tertib dalam berlalu lintas kepada masyarakat sudah terlaksanakan. karena tidak hanya menyampaikan saja dan menemui masyarakat. Dinas perhubungan dan Satuan lalulintas Kota Tanjungpinang untuk mensosialisasi dengan cara menyampaikan di media sosial, radio, sepanduk berupa baliho, Koran. Jadi Dinas perhubungan dan Satuan lalulintas dalam mensosialisasi tentang peraturan tata tertib dalam berlalu lintas kepada masyarakat sudah terlaksanakan.

d. Analisa Pengamatan

Pengamatan, selain teknik itu ada teknik pengawasan lainya adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secara cermat mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesunggunnya baik yang

berkaitan dengan barang atau benda, maupun yang berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang–orang yang berkaitan dalam sebuah kelembagaan. Menurut suharsimi Arikonto (2009:122) pengamatan adalah secara langsung terhadap objek yang terdapat di lingkungan baik yang sedang berlangsung saat itu masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian tehadap suatu kajian objek dengan menggunakan pengindraan.

Menurut analisis penulis rambu lalulintas merupakan suatu bagian fasilitas atau jalan umum yang berupa lambang, huruf, angka dan kalimat yang dibuat dengan tiang memakai papan atau sejenis nya. Fungsi rambu lalulintas ini yang paling utama atau intinya adalah untuk mendukung keselamatan pengendara atau pengemudi. Fungsi adanya rambu-rambu dan CCTV tersebut merupakan faktor-faktor yang mendukung untuk keselamatan dan pengendara atau pengemudi, dengan adanya CCTV di tiap-tiap lampu merah merupakan bentuk pengawasan supaya masyarakat merasa diawasi. Jadi rambu lalulintas bukan lah suatu hal buruk bagi pengguna jalan.

Dan yang terdapat tingginya pelanggaran hampir sama pada tahun 2017 dan tahun 2018 itu disebabkan kurangnya kesadaran oleh penggendara atau pengemudi dalam menaati aturan tata terttib lalulintas, disamping itu juga bahwa jumlah personil patroli masih kurang sehinggga dalam bentuk pengawasan dari pihak satuan lalulintas masih kurang maksimal, kebutuhan akan petugas sangat vital bagi pelakasanaan pengawasan karena dengan adanya kesimbangan jumlah petugas pengawas dengan apa yang diawasi akan memungkinkan tingkat efektifitas dari pengawasan akan tinggi.

2. Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Tertib Lalulintas Oleh Dinas Perhubungan Dan Satuan Lalulintas Kota Tanjungpinang.

Faktor-faktor penghambat merupakan bagian dari pada proses pengawasan yang dilaksanakan. Bagian ini merupakan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan yang dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pengawasan itu sendiri, masalah-masalah tersebut bisa timbul dari internal, pelaksana pengawasan maupun yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat mengahalangi keberhasilan dari pengawasan itu sendiri yang antara lain adalah:

Permasalahan yang timbul yang dapat menjadi penghalang dalam keberhasilan dalam melakukan pengawasan di kota Tanjungpinang yang sangat menonjol yaitu kurangnya personil yang melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Didalam sebuah organisasi atau instansi merupakan hal yg mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya atau tidak sebanding pekerja yng bertugas dengan kapasitas atau jumlah pekerjaan yang ia kerjakan akan memungkinkan pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau maksimal. Didalam permasalahan ini jumlah petugas yang melaksanakan pengaturan, penjaga , pengawal dan patroli di perkirakan 1 berbanding 3dengan melihat kondisi dan keadaan kondisi di lapangan dan memungkinkan hasil pelaksanaan tugas yang dilaksanakan kurang maksimal. Jadi sangat diperlukan adanya panambahan personil atau petugas agar pelaksanaan tugas yang dicapai terlaksana dengan baik.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati tertib berlaulintas, masyarakat kota Tanjungpinang masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalulintas, sehingga dapat membahayakan diri sendiri atau pun pengendara lainnya. Ditambah kurangnya rambu-rambu lalulintas seperti cctv sehingga banyak yang mengalami pelanggaran karena masyarakat tidak marasa di awasi. Dalam permasalahan ini hambatan yang timbul merupakan masalah yang cukup sulit untuk membenahinya.

PEMBAHASAN

Pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Satlantas dan Dishub kota Tanjungpinang sudah sesuai standar dengan prosedur dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal piket, tugas nya seperti melakukan patroli. Apabila ada kemacetan terjadi para petugas turun langsung mengunrangi kemacetan , apabila ada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran akan dilakukan penindakan diberikan peringatan ataupun tilang.

Untuk pelaksanaan seperti patroli, penjagaan dan pengaturan sudah berjalan lumayan baik, dan memang harus selalu meningkatkan kinerja pengawasannya agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pengguna jalan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam hal ini meskipun pengawasan sudah dilakukan lumayan baik tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal yang tidak harapkan terjadi seperti kecelakaan lalulintas karena pengendara ugal-ugalan serta masih kurang nya kesadaran dari masyarakat pengguna jalan karena yang penulis yang ketahui, masih

ada saja masyarakat yang melanggar dengan melewati jalur yang sudah di tutup meskipun sudah tersedia rambu-rambu lalulintas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dan hasil wawancara kepada masyarakat kota Tanjungpinang, Satlantas polresta Tanjungpinang dan Dishub Tanjungpinang dalam penindakan penindakan pelanggaran lalulintas sudah cukup baik, dengan memberi teguran tertulis dan teguran lisan terhadap pelnggar lalulintas dan memeberikan sanksi tilang sesuai denda tilang yang berlaku di Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan .

Namun masih saja banyak pengendara yang melanggar rambu-rambu lalulintas diketahui penyebab faktor pelanggaran yang terjadi kebanyakan disebabkan karena ketidak tertiban masyarakat dalam mematuhi tata tertib lalulintas di jalan raya. Pelanggaran yang dilakukan masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan penting peraturan lalulintas dan keselamatan berkendara. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalulintas karena terburu-buru atau malas menunggu dan kebanyakan pengendara masih dibawah umur. Untuk itu diharapkan Satlantas dan Dishub Kota Tanjungpinang lebih tegas lagi dalam menangani para pelanggar lalulintas dan memproses secara hukum.

Program penuyuluhan yang dilaksankan oleh pihak Satlantas polresta kota Tanjungpinang dan Dishub kota Tanjungpianang sudah cukup baik, dengan mengadakan Sosialisasi tentang peneyelanggaraan keselamatan berlalulintas mengadakan penerangan keliling terjun langsung ketengah-tengah masyarakat. Namun belum maksimal, karena ada sebagian masyarakat kota Tanjungpinang yang belum mengetahui tentang penyuluhan keselamatan lalulintas yang dilaksanakan oleh

pihak Satlantas dan Dishub, hanya sebagian kecil masyarakat yang sudah mengetahui tentang penyuluhan keselamatan berlalulintas tersebut namun baru sekali mendapatkannya. Untuk itu dalam pelayanan langsung ke masyarakat di harapkan pihak Satlantas dan Dishub lebih Rutin dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh penulis dari uraian bab sebelumnya mengenai Pengawasan Tertib Lalulintas Dalam Menanggulangi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan tertib laulintas di Kota Tanjungpinang yang di lakukan oleh pihak Satuan Lalulintas dan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sudah mengalami sedikit penurunan namun belum maksimal di karenakan masih cukup banyak kejadian pelanggaran dan kecelakaan tiap tahunnya.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pengawasan Tertib Lalulintas Dalam Menanggulangi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Kota Tanjungpinang di temukan ada beberapa yang menjadi faktor penghambat yaitu:
    a. Sumber Daya Manusia atau petugas yang mewakili unit penjaga, pengawalan dan patroli yang ada pada Satlantas tersebut masih

kurang, dan kualitas sumber daya manusia nya perlu ditingkatkan, dalam penetapan jumlah petugas dengan apa yang diawasi tidak membuat sebanding sehingga membuat para petugasyang melaksanakan pengaturan, penjaga, pengawalan, patroli kewalahan serta hasil tugas kurang terlaksana dengan baik.

b. Kurangnya kesadaran akan berkendara yang baik dan aman yang dapat menjadi faktor penghambat, dari terlaksananya pengawasan yang diharapkan dapat dilihat dari masih banyak pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keamanan dalam berkendaraan serta melanggar rambu-rambu peringatan.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan peneliti maka dapat memberikan saran-saran sebaga berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam berkendaraan, untuk itu sebaiknya Satlantas meningkatkan pengawasan dijalan. Dalam pelaksanaan penegakan Hukum dalam berlalulintas harus didukung dengaan alat elektronik seperti CCTV pemantau jalan dengan maksud agar masyarakat selalu merasa di awasi.
2. Satuan Lalulintas Polresta Kota Tanjungpinang lebih meneliti lagi dimana letak kekurangan dan kesalahan terjadi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sebelumnya dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan secepatnya serta membuat program tambahan atau cadangan dan

melakukan koordinasi pengawasan yang baik dengan instansi yang terkait Dinas perhubungan Kota Tanjungpinang.

DAFTAR PUSTAKA

Arikonto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadari. 2000. *Administrasi Personel Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Haji Intermedia.

Siagian, p. Sondang. 2003. *Manjemen sumber daya manusia*, Jakarta, Bumi Aksara

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT . Refika Aditama.

Sugiyono.2006. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta

----------.2012. *Metode Penelitian Kuaitatif* . Bandung: CV Alfabeta

----------. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta.

Kristian, Tommy. Yuliani, Febry. 2015. *pengawasan tertiblalu lintas oleh satlantas kota pekanbaru (studi kasus jalan sudirman).* Jom FISIP Volume 2 No.1.

Novrisaldi Nasution. 2018. *Pengawasan Lalu Lintas Dalam Mengatasi Kemacetan Oleh Dinas Perhubungan Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.* Jom FISIP Vol. 5.

Stella Graldina Puspala. 2018. *Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru (Studi Kasus Anak Di Bawah Umur).* Jom FISIP Vol.5.

Dokumen-dokumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.